

DYNAMICS OF ISLAMIC EDUCATION: MADRASAH TULUNGAGUNG REGENCY (1968-1984)

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM: MADRASAH KABUPATEN TULUNGAGUNG (1968-1984)

Muhammad Risalul Amin ^{1a(*)} Hendra Afiyanto ^{2b}

¹Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung

^arisalul46@gmail.com

^bhendra.iainta11@gmail.com

(*) Corresponding Author
 0812131993840

How to Cite: Muhammad Risalul Amin (2021). Title of article. Santhet, (), . doi:

Received:
 Revised:
 Accepted:
Keywords:
 Tulungagung,
 Pendidikan
 Islam,
 Madrasah

Abstract

The growth of madrasas in Tulungagung Regency has contributed to the development of Islamic education in Indonesia. The existing madrasas in Tulungagung Regency do not exist just like that but go through various processes. The development of madrasas in Tulungagung Regency cannot be separated from the effects of historical events, government policies and community responses. In the early days of growth, the madrasa in Tulungagung Regency also intersected with a historic event, namely the G30 S PKI. This paper aims to provide a description of how the early development of madrasas in Tulungagung Regency. In this study, the research method used is historical research methods. Historical research methods include heuristics, verification, interpretation, and historiography. In this study it was found that the early growth of madrasas in Tulungagung Regency began around the 1950s and developed in the 1960s. The presence of madrasas in Tulungagung Regency is the result of the ideas of Muslim leaders, scholars as well as from the development of Islamic boarding school education. Madrasas play an important role in their presence in Tulungagung Regency. Apart from being a syi'ar da'wah Islam madrasa also helps eradicate illiteracy in Tulungagung Regency.

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan dan pembaharuan di dunia pendidikan Islam Indonesia. Madrasah saat ini semakin tumbuh dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tulungagung. Menurut Hariyono (2017) ketika membahas tentang sejarah suatu tempat "locality" maka artinya pembahasan dalam tulisan ini masuk dalam wilayah sejarah lokal. Pemilihan judul "*Dinamika Pendidikan Islam: Madrasah Kabupaten*

Tulungagung (1968-1984)" sebagai penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu kesadaran diri sekaligus sebagai media pengembangan kapasitas belajar bagi peneliti dan pembacanya. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari suatu hal yang lebih dekat tidak dikenal dan dipahami dengan baik dibandingkan dengan suatu hal yang jauh di sana. Kita mungkin tahu peristiwa sejarah dunia namun sering kali gagap dalam peristiwa sejarah yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat membawa peneliti dan pembaca untuk

tergerak mengenal sejarah lokal yang dalam hal ini adalah sejarah pendidikan Islam di Kabupaten Tulungagung. Tentu penulis juga berharap penelitian ini dapat mengawali ataupun melengkapi penelitian tentang sejarah pendidikan Islam di Kabupaten Tulungagung sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

Pemilihan madrasah sebagai pembahasan pada tulisan ini karena madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kelebihan yaitu terdapat ilmu agama Islam dan Ilmu pengetahuan umum sebagai kurikulumnya. Selain itu, hal yang menarik dan penting untuk dipahami adalah bagaimana perjalanan madrasah berhadapan dengan zaman serta mewujudkan eksistensinya untuk dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan diterima oleh masyarakat. Adapun pemilihan Kabupaten Tulungagung adalah karena salah satu keunikannya yaitu kepercayaan jalan hidup ala santri masyarakat Tulungagung yang sangat kuat. Menjadi santri merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena santri mengesankan bahwa seseorang adalah sosok yang berilmu agama, rajin beribadah dan memiliki akhlak yang baik (Hasani, 2007). Pemilihan rentang waktu tahun 1968 karena pada tahun tersebut merupakan tahun pasca pemberontakan PKI dan awal pemerintahan orde baru. Sedangkan tahun 1984 adalah babak baru bagi perkembangan madrasah karena pada tahun itu merupakan masa peralihan dimana sebelum tahun 1984 madrasah masih berproses untuk diakui kehadirannya.

Eksistensi madrasah saat ini tidak ada begitu saja melainkan melalui berbagai proses. Ketika berbicara tentang sejarah madrasah maka tentu akan berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam dan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terdahulu mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sebelum membahas tentang sejarah madrasah di Tulungagung tahun 1968-1984. Dengan memahami perkembangan Islam

dan pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat dipelajari sebab dan akibat dari sebuah peristiwa yang kemudian memberikan efek pada perkembangan madrasah di Kabupaten Tulungagung.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak awal Islam masuk dan berkembang di negeri ini. Artinya, pendidikan Islam sama tuanya dengan awal masuknya Islam di Indonesia (Hasbullah, 1995). Sejak awal abad masehi telah ada jalur lintas pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kawasan timur yaitu kepulauan India Timur dan Pesisir Selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai sampai Maskat, Raisut, Siraf, Guadar, Daibul, Pantai Malabar yang meliputi Gujarat sampai Selat Malaka, Peureulak (Aceh Timur), Lamno (pantai barat Aceh), Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makasar, Ternate, dan Tidore (Karim, 2007).

Dari uraian di atas dapat diperkirakan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriah. Islam datang ke Indonesia ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7/8 M, saat Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Keijzer, Crawford, Niemann, de Hollander, Hamka, Hasymi, Al-Attas, Djajadiningrat, dan Mukti Ali. Bukti-bukti teori sejarah ini cukup kuat karena pada abad ke-7/8 M, selat Malaka sudah dilintasi oleh para pedagang muslim dalam pelayaran dagang mereka ke Asia Tenggara dan Asia Timur (Hasbullah 2012).

Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan di antara strategi penyebaran Islam tersebut adalah melalui proses perdagangan. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, Anak Benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa, dan pada akhirnya

membentuk masyarakat muslim. Kemudian penyebaran Islam juga dilakukan dengan dakwah bi al-hall oleh para muballigh yang sebagian juga merupakan pedagang. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan dan dalam keseharian mereka menampilkan sikap sederhana (Karim, 2007). Selanjutnya Islam menyebar melalui perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim, muballigh dengan anak bangsawan Nusantara. Dari perkawinan dengan puteri raja-lah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Setelah Islam mulai kuat Islam mulai tersebar melalui pendidikan. Tempat belajar ilmu agama Islam mulai tumbuh di pusat-pusat perekonomian. Selain itu, orang-orang Islam juga menuntut ilmu agama di langgar dan masjid. Islamisasi juga berjalan melalui jalur kultural yaitu dengan akulturasi Islam dengan budaya lokal (Karim, 2007). Islam terus berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubaligh.

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa Pendidikan Islam di Indonesia sudah dimulai saat awal Islam masuk dan berkembang di Nusantara. Pendidikan Islam mula-mula melalui perkenalan tentang Islam secara kasatmata dari para pembawa agama Islam yang merupakan para pendakwah, pedagang dan juga dari para muslim biasa yang singgah di Nusantara. Islam melalui para pembawanya, membentuk relasi dengan pribumi melalui aktivitas sehari-hari mereka (Ali, 1947). Pedagang-pedagang muslim menjalankan aktivitas dagang mereka sesuai dengan tuntunan agama Islam sehingga secara tidak langsung mereka telah mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat melalui cara mereka berkomunikasi, sikap atau bahkan pakaian mereka. Para pendakwah juga menyebarkan Islam dengan cara yang lembut yaitu dengan jalan hikmah. Cara yang demikian menghadirkan Islam yang terasa melengkapi keadaan masyarakat setempat sehingga Islam tidak dianggap bertentangan dengan kebiasaan yang sudah ada. Dengan wujud penyebaran Islam yang

sederhana namun tetap mencapai esensinya, Islam diterima dengan mudah dan cepat sebagai agama baru masyarakat pribumi. Islam terus menyebar ke seluruh penjuru Nusantara yang sebagian besar wilayahnya saat ini adalah Indonesia.

Islam terus berkembang di Nusantara dan sangat pesat di pulau Jawa. Pemeluknya semakin bertambah dalam jumlah yang masif. Bertambahnya pemeluk agama Islam juga diiringi dengan keinginan untuk belajar agama Islam lebih dalam lagi. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu awal munculnya tempat-tempat belajar ilmu agama Islam. Pada awalnya pendidikan Islam diajarkan di Masjid dan Langgar dengan sistem klasik. Selanjutnya, proses pengajaran Islam berkembang melalui lembaga pesantren. Kemudian proses pendidikan Islam berkembang lagi melalui madrasah yang muncul di Indonesia sekitar awal abad ke 20. Menurut Daulay (2007) lahirnya Madrasah dipelopori oleh para pelajar Indonesia yang pulang setelah mengenyam pendidikan dari timur tengah. Faktor yang menyebabkan lahirnya madrasah adalah karena kehadiran sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda menginspirasi para pengembang pendidikan Islam di Indonesia untuk melakukan pembaharuan. Selain itu, adanya intervensi pemerintah Hindia-belanda yang menyebabkan ruang gerak pendidikan Islam terbatas juga menjadi salah satu faktor lahirnya madrasah di Indonesia. Kehadiran madrasah melengkapi pendidikan Islam tradisional karena berjalan berdampingan dan saling mengisi satu sama lain. Kemunculan madrasah di Indonesia diawali dengan berdirinya madrasah Adabiyah di Sumatera Barat pada tahun 1908. Kemudian berdiri Madrasah School oleh Syaikh M. Taib Umar pada tahun 1910, kemudian 1915 didikan oleh M. Mahmud Yunus yaitu Madrasah Diniyah sebagai sekolah lanjutan dari Madrasah School. Sedangkan di pulau Jawa sendiri terdapat Madrasah Salafiyah Tebuireng Jombang (1919), Madrasah Krapyak di Yogyakarta (1911), Madrasah Pesantren Rejoso Peterngan (1927),

Madrasah Assa'adah di Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik (1932) Thoha (2011). Dinamika perkembangan Madrasah terus berlanjut hingga Indonesia mencapai kemerdekaan. Madrasah mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena kebijakan oleh pemerintah untuk tetap melanjutkan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia.

Madrasah di Indonesia pada awalnya memiliki arti sebagai tempat belajar agama Islam. Muatan belajar yang dipelajari di dalam madrasah adalah agama Islam. Kemudian seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah khususnya dengan pengesahan UU Pendidikan Nasional madrasah memiliki makna yaitu sekolah umum yang berciri khas Islam (Suryana 2018). Dari awal hadirnya madrasah di Indonesia, madrasah mengalami berbagai proses dan semakin tumbuh berkembang sehingga semakin banyak madrasah yang muncul dan semakin melengkapi pendidikan Islam di Indonesia. Di pulau Jawa, madrasah tumbuh subur di berbagai wilayahnya dan diantara wilayahnya yaitu di Kabupaten Tulungagung. Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang luas wilayahnya mencapai 1.150,41 Km² dan terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Penduduk Tulungagung berjumlah 1.030.926 jiwa yang terbagi atas laki-laki 514.536 jiwa dan perempuan 516.390 jiwa. Mayoritas agama yang dipeluk penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah Islam (98,39 persen), diikuti Kristen (1,05 persen), Katolik (0,38 persen), Budha (0,14 persen) dan Hindu (0,05 persen) (Tulungagung, 2010). Dengan mayoritas umat Islam sebagai penduduk di Tulungagung tentu Pendidikan Islam khususnya madrasah di Tulungagung memiliki eksistensi. Bagaimana eksistensi dan perkembangan madrasah di Tulungagung akan dibahas pada tulisan ini dan rentang waktu yang diambil adalah pada tahun 1968-1984.

Hadirnya madrasah di Tulungagung bermula dari upaya pengembangan Pendidikan Islam pesantren tradisional. Pesantren tradisional sebagai cikal bakal

madrasah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melaksanakan pendidikan formal dalam bentuk pendirian sekolah (madrasah) dengan tetap meneruskan sistem halaqah dan sorogan. Pengembangan dilakukan sebagai respon dari pertumbuhan pendidikan yang pesat dan sebagai usaha untuk menambah minat pelajar untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam. Salah satu pondok pesantren yang mengembangkan lembaganya melalui pendirian madrasah adalah Pondok Pesantren Panggung. Pada tahun 1960 Pondok Pesantren Panggung mendirikan madrasah diniyah tingkat ibtida'iyah dengan tujuan murni sebagai syi'ar dakwah dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar pondok panggung. Selanjutnya, pada tahun 1964 sebagai lanjutan jenjang dari mabdrasah ibtida'iyah Pondok Pesantren Panggung mendirikan madrasah tsanawiyah (Wiantoro 2020). Madrasah-madrasah yang ada di Tulungagung tidak hanya lahir dari pengembangan pesantren tradisional saja, akan tetapi juga melalui gagasan para tokoh dan ulama. Salah satu ulama yang menggagas pendirian madrasah adalah K.H. Muhammad Siradj. K.H. Muhammad Siradj mendirikan Sekolah Rakyat VI Agama pada tahun 1957 yang saat ini menjadi MIN 1 Tulungagung (Aprilina, 2019). Pendirian Sekolah Rakyat VI Agama oleh K.H. Muhammad Siradj dilandaskan atas kecintaannya kepada pendidikan agama Islam dan NU. Bukti kecintaan K.H. Muhammad Siradj itu kemudian kembali diwujudkan olehnya dengan mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama (saat ini MTs N 2 Kalidawir) pada tahun 1961 (Mustofa, 2019). Kapasitas K.H. Muhammad Siradj untuk mendirikan sekolah agama Islam selain karena sosok K.H. Muhammad Siradj merupakan seorang yang aktif berjuang untuk Islam dan NU, K.H. Muhammad Siradj juga berasal dari keluarga yang berada pada masa itu (Basith, 2014).

Perkembangan pendidikan Islam khususnya madrasah sebelum 1968 di Tulungagung cukup baik. Pemerintah melalui kebijakannya mulai memberikan perhatian

untuk madrasah. Peran pemerintah itu dapat dilihat pada Sekolah Rakyat VI Agama Tunggangri yang sejak tahun 1957 sudah diakui dalam naungan Kementerian Agama sedangkan PGAP Tunggangri diakui pada tahun 1962 (Aprilina, 2019). Pengakuan tersebut penting karena berdasarkan UU Nomor 4/1950 lembaga Pendidikan Agama yang sah diakui negara adalah lembaga Pendidikan Islam yang berada dibawah naungan Kementerian Agama (Kosim, 2007). Selanjutnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama pada tahun 1967 mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan madrasah dalam semua tingkatan mulai dari ibtidaiyah sampai Aliyah. Wujud dari kebijakan tersebut diawali dengan SK Menteri Agama 23 Juli 154/1968 yang menetapkan PGAP Tunggangri menjadi Mts Percobaan Negeri dan Sekolah Rakyat VI Agama menjadi MI Percobaan Negeri. Pada tahun 1978 sesuai dengan yang tercantum pada Repelita II tentang bantuan untuk madrasah, MI PN Tunggangri mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bangunan seluas 252 m² (Aprilina, 2019).

Meskipun pada awal berdirinya madrasah-madrasah di Tulungagung cukup lancar namun bukan berarti semua madrasah tidak menghadapi rintangan. Seperti SP IAIN yang statusnya tertunda menjadi madrasah aliyah negeri menyebabkan kekhawatiran tentang pandangan madrasah yang tidak menjadi tujuan utama bagi para pelajar terjadi. Sebagaimana yang dikatakan Rohani (2021) yaitu SP IAIN antara tahun 1970-1976 hampir kandas sebagai lembaga Pendidikan Islam. Tentu saja hal itu terjadi bukan tanpa sebab melainkan karena pada tahun 1970 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan Nomor 213/1970 tentang penghentian penegerian madrasah atau penghentian pendirian madrasah negeri (Kosim, 2007). Kebijakan tersebut keluar karena jumlah madrasah yang dinegerikan saat itu sudah mencapai batasan sementara penegerian. Menurut Rohani (2021) penundaan status menjadi negeri mengakibatkan timbulnya pandangan masyarakat yang meragukan

kapasitas SP IAIN sebagai sekolah yang dapat menjembatani ke perguruan tinggi.

Madrasah merupakan lembaga Pendidikan Islam oleh karena itu proses mendidik di madrasah tentunya berupaya untuk mengembangkan potensi anak didik sesuai dengan hukum-hukum ajaran Islam (Esti dan Sadikin, 2019). Dalam penerapan Pendidikan Islam terdapat cara-cara atau metode untuk menggapai tujuan dari Pendidikan Islam. Diantara metode-metode Pendidikan Islam adalah Metode Pengambilan Kesimpulan, Metode Perbandingan, Metode Kuliah, Metode Dialog dan Perbincangan, Metode Lingkaran, Metode Riwayat, Metode Mendengar, Metode Membaca, Metode hafalan, Metode Imla', Metode Lawatan, dan Metode Pemahaman (Nurjannah, 2015).

Dari beberapa teori dan metode Pendidikan Islam diatas dalam penerapannya metode-metode tersebut akan berhadapan dengan situasi dan kondisi madrasah. Artinya, Madrasah sebagai tempat Pendidikan Islam dengan berbagai metodenya akan bersinggungan dengan kebijakan pemerintah. Selain pengaruh dari kebijakan pemerintah madrasah juga dipengaruhi dengan berbagai kejadian bersejarah di Indonesia dan dalam hal ini kebijakan pemerintah dan peristiwa sejarah di Indonesia adalah pada tahun 1968-1984. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa bersejarah di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dan hampir setiap sudut wilayah di negeri ini merasakan efeknya.

Secara kronologis setiap peristiwa yang memiliki pengaruh terhadap negara pasti akan menuntut pemerintah untuk mencari solusi dari dampak kejadian tersebut. Misalnya di awal pemerintahan Orde Baru, Ketika pasca G30 S PKI tahun 1965, pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap lembaga Pendidikan Islam, sebab disadari bahwa dengan bermentalkan agama yang kuat dan kokoh, bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Hal yang demikian sangat wajar karena memang G30 S PKI adalah peristiwa pemberontakan komunis

yang sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Peristiwa G30 S PKI bukan hanya tentang pemberontakan saja tetapi juga pembunuhan dan pembantaian manusia oleh komunis (Permata, 2016). Sedangkan masa orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Suharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan Agama

Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Awal dari Orde Baru pun bergulir di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto, nama Orde Baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Sukarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah atau perbedaan sang pemimpin orde, tetapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut.

METODE

Pada kajian ini metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Pertama, heuristik yaitu pengumpulan sumber sejarah atau disebut juga sebagai data sejarah. Sumber atau data sejarah harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber sejarah menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis bisa berupa historiografi atau dokumen tertulis terkait permasalahan yang diteliti dan sumber tidak tertulis atau sumber lisan. Sumber tertulis dalam penelitian ini diambil dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan buku, artikel dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun salah satu sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya terkait perkembangan madrasah pada masa Orde Baru yang ditulis oleh Anzar Abdullah berjudul *"Perkembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia Dari Masa Kolonial Sampai Masa Orde Baru"*. Selanjutnya, sumber tertulis yang berkaitan dengan Tulungagung pada rentang waktu yang diambil adalah penelitian oleh Abdul Basith dalam skripsinya berjudul *"K.H. Muhammad Siradj dan Perjuangannya di Tulungagung (1906-1982)"*. Selain itu,

sumber tertulis juga berupa catatan atau lembaran dokumen terkait sejarah yang dimiliki oleh madrasah yaitu salah satunya seperti *"Dokumentasi Profil MAN 1 Tulungagung"*. Sumber selanjutnya dalam penelitian ini adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang dilisankan oleh manusia dimana yang melisankan merupakan pelaku, pengikut ataupun saksi dari peristiwa sejarah pada masa itu. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan sumber lisan adalah dengan teknik wawancara kepada pihak pengelola madrasah ataupun dari pihak lain terkait yang masih memiliki pengetahuan tentang sejarah madrasah tersebut (Rahmat 2009).

Kedua, verifikasi yaitu menganalisa keaslian sumber dan kredibilitas sumber. Menganalisa keaslian sumber jika seandainya sumber tersebut berbentuk fisik seperti buku atau sumber tertulis lainnya maka keaslian dapat dilihat dari kondisi fisik keadaan kertas, tinta, dan gaya bahasa penulisan. Sedangkan jika sumber lisan maka kritik dapat dilakukan kepada narasumber seperti mempelajari latar belakang dan fisik narasumber. Untuk mengetahui kredibilitas sumber jika sumbernya adalah sumber tertulis maka dapat dilakukan dengan cara perbandingan. Cara perbandingan adalah membandingkan sumber-sumber yang sudah terkumpul untuk dicari data yang paling teruji kredibilitasnya.

Perbandingan juga dapat dilakukan untuk pencarian kredibilitas sumber lisan dengan membandingkan penyampaian dari beberapa narasumber (Abdurahman, 1998).

Ketiga, Interpretasi yaitu penafsiran oleh peneliti terhadap sumber yang telah didapatkan agar menjadi fakta yang selaras (Afcarina, 2020). Interpretasi terdiri dari analisis yaitu menguraikan data dan sintesis yang berarti menggabungkan data. Menguraikan data adalah membagi data yang kompleks menjadi beberapa bagian untuk dianalisis sehingga mencapai suatu kesimpulan. Penguraian data digunakan

terhadap sebuah sumber yang biasanya memiliki beberapa kemungkinan. Sedangkan menyatukan data atau sintesis adalah menggabungkan beberapa data kemudian menganalisisnya sehingga mencapai suatu kesimpulan (Kuntowijoyo, 1995).

Keempat, historiografi yaitu merupakan penulisan serta laporan dari hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian sejarah harus memiliki kronologi yang sistematis serta penyajiannya memiliki tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian dan simpulan (Kuntowijoyo, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah merupakan sekolah umum yang berciri khas Islam. Kurikulum madrasah menitikberatkan pada mata pelajaran agama. Madrasah mulai hadir di Tulungagung sekitar tahun 1957-1968. Dapat dikatakan kemunculan madrasah pada tahun tersebut karena madrasah pertama yang termasuk dalam klasifikasi peraturan Kementerian Agama di Tulungagung adalah MIN 1 Tulungagung yang didirikan oleh K.H. Muhammad Siradj pada tahun 1957 (Aprilina, 2019). Kemunculan awal madrasah-madrasah lain di Tulungagung umumnya sekitar tahun 1960 sampai tahun 1968. Diantara madrasah-madrasah yang lahir pada tahun tersebut adalah MTs N 2 Tulungagung (1962) dan MAN 1 Tulungagung (1966). Secara umum latar belakang berdirinya madrasah-madrasah di Tulungagung adalah hasil dari gagasan para tokoh masyarakat, ulama, sarjana dan dari usaha pengembangan pendidikan Islam pondok pesantren. Hal itu sangat wajar jika melihat potret kondisi Islam di Tulungagung yang sangat dominan. Pada tahun 1968 di Tulungagung sudah tersebar masjid, langgar, pondok pesantren, dan madrasah di berbagai wilayahnya (Widyawati, 2018). Perihal itu juga sangat alami mengingat Islam di Tulungagung memang sudah tumbuh dan berkembang bahkan sejak awal

pendirian pusat kota Tulungagung pada tahun 1824 (Widyawati, 2018).

Berbicara tentang pendidikan Islam di Tulungagung pada tahun 1968-1984 tentu tidak akan lepas dari peran para tokoh-tokohnya pada masa itu. Selain K.H. Muhammad Siradj, sosok yang juga menggagas pendirian madrasah di Tulungagung adalah K.H. Arief Mustaqiem DA. Bersama dengan Drs. Ali Mahfud Mashuri, Drs. Abdul Fatah Ghozali, Hj. Sunsufi BA., Drs. Murtadho, Drs. Subari Hasan Drs. Nurul Hadi, Masrifah B.Sc., H. Mahmud BA., Drs. Habib, K.H. Arief Mustaqiem mengadakan pertemuan untuk membentuk sekolah persiapan. Dari hasil pertemuan tersebut, maka dirintis Yayasan yang bertugas membentuk sekolah persiapan dengan nama Yayasan Islam Sunan Rahmat. Dari kinerja Yayasan Islam Sunan Rahmat maka pada tahun 1966 berdirilah SP IAI Singoleksono. Adapun kepanjangan dari SP IAI Singoleksono adalah "Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Singoleksono". Berdirinya SP IAI Singoleksono adalah sebagai bentuk kepedulian tokoh masyarakat, ulama, dan para sarjana di Tulungagung terhadap pendidikan tinggi Islam (Tulungagung, 2017). Pada tahun 1967 Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan madrasah dalam semua tingkatan mulai dari ibtidaiyah

sampai Aliyah. Wujud dari kebijakan tersebut diawali dengan SK Menteri Agama tanggal 17 Juli 1968, untuk menetapkan SP IAI Singleksono dengan status percobaan negeri dengan nama "Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri".

Peran pemerintah bukan hanya tentang kebijakan saja tetapi pemerintah juga memberikan fasilitas yaitu berupa peminjaman gedung. Gedung tersebut adalah Gedung bekas sekolah cina bernama "Chung Wa Chung Wi". Pasca pemeberontakan PKI masyarakat cina yang ada di Tulungagung dicurigai memiliki keterkaitan dengan komunis. Isu tersebut melahirkan konflik hingga tak jarang terjadi benturan fisik antara masyarakat asli Tulungagung dengan orang-orang cina. Perselisihan terus terjadi hingga pada akhirnya orang-orang cina terusir dan gedung sekolah Chung Wa Chung Wi tidak lagi digunakan. Pemerintah kemudian mengambil alih gedung tersebut dan pada tahun 1968 melalui Kodim gedung itu dipinjamkan untuk SP IAIN. Meskipun terlihat lancar namun perjalanan SP IAIN bukan tanpa hambatan. SP IAIN antara tahun 1970-1976 hampir kandas sebagai lembaga Pendidikan Islam (Rohani 2021). SP IAIN yang statusnya tertunda menjadi madrasah aliyah negeri menyebabkan kekhawatiran tentang pandangan madrasah yang tidak menjadi tujuan utama bagi para pelajar terjadi. Tentu saja hal itu terjadi bukan tanpa sebab melainkan karena pada tahun 1970 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan Nomor 213/1970 tentang penghentian penegerian madrasah atau penghentian pendirian madrasah negeri. Kebijakan tersebut keluar karena jumlah madrasah yang dinegerikan saat itu sudah mencapai batasan sementara penegerian (Kosim, 2007). Penundaan status menjadi negeri mengakibatkan timbulnya pandangan masyarakat yang meragukan kapasitas SP IAIN sebagai sekolah yang dapat menjembatani ke perguruan tinggi (Rohani, 2021). Pada akhirnya hambatan tersebut mendapat angin segar ketika SKB Tiga Menteri 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah yang salah satu

kebijakannya sangat menguatkan posisi madrasah. Kebijakan tersebut adalah kesetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum setingkat dan lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum (Abdullah, 2013). Kemudian menyusul kebijakan Menteri Agama nomor 15, 16, 17, tahun 1978 untuk melanjutkan restrukturisasi madrasah. Dengan kebijakan tersebut selain SP IAIN yang ditetapkan sebagai MAN 1 Tulungagung beberapa madrasah-madrasah yang lain di Tulungagung juga resmi menjadi negeri seperti MI PN Tunggangri yang menjadi MIN 1 Tulungagung.

Sejak menjadi negeri MAN 1 Tulungagung berkembang dengan pesat sebab dengan ditetapkannya SP IAIN sebagai Madrasah Aliyah Negeri maka penyelenggaraan administrasi sekolah juga ikut ditingkatkan. Menurut Suwandi (2020) keraguan masyarakat sebelumnya terhadap MAN 1 Tulungagung perlahan juga mulai berubah dan mulai menaruh perhatian lagi kepada MAN 1 Tulungagung. Pengembangan MAN 1 Tulungagung terus dilanjutkan dan pada tahun 1982 lokasi MAN 1 Tulungagung dipindahkan ke desa Beji, Boyolangu. Perpindahan lokasi MAN 1 Tulungagung bertujuan untuk mendapatkan lokasi yang lebih strategis. Lokasi MAN 1 Tulungagung yang baru juga merupakan upaya bantuan dari pemerintah. Melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung dengan Nomor 19 Tahun 1981 ditetapkan bahwa peminjaman tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung yang terletak di belakang Kantor Deperta seluas 8098,66 M² kepada Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung 1. Perkembangan yang baik itu bukan berarti MAN 1 Tulungagung tidak menghadapi tantangan lagi. Walaupun fasilitas sudah cukup memadai namun peningkatan tersebut belum diiringi dengan penambahan jumlah tenaga pengajar. Kondisi yang demikian dialami oleh Bapak Ali Ahmad yang merupakan guru bidang utama Qur'an hadist. Selain sebagai guru Qur'an hadist Bapak Ali Ahmad juga merangkap tugas sebagai guru aqidah

akhlak dan olahraga. Jumlah siswa yang naik sedangkan tenaga guru yang tidak berimbang menyebabkan situasi dimana seorang guru bisa saja merangkap untuk beberapa mata pelajaran. Artinya suasana yang demikian belum memungkinkan adanya metode pembelajaran yang spesifik. Fokus pada saat itu adalah bagaimana madrasah dapat memaksimalkan tenaga guru untuk mencukupi kebutuhan mata pelajaran bagi siswa. Walaupun berat, situasi itu pada akhirnya bisa dikendalikan meskipun membutuhkan waktu untuk menyesuainya (Suwandi, 2020).

Dari berbagai uraian sebelumnya, dapat dilihat bagaimana perjalanan madrasah-madrasah di Tulungagung pada tahun 1968-1984 umumnya masih dalam proses awal berdiri dan dalam usaha-usaha untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta khususnya dari pemerintah. Kondisi yang demikian memang selaras dengan perkembangan madrasah pada umumnya di Indonesia dimana pada masa awal pemerintahan orde baru madrasah masih berjuang untuk

keberadaannya (Yuningsih, 2015). Terlepas dari kondisi madrasah yang masih seperti itu, bukan berarti madrasah tidak memiliki kontribusi yang penting di Tulungagung. Selain untuk syi'ar dakwah Islam di Tulungagung, madrasah juga berperan untuk pemberantasan buta huruf di Tulungagung (Wiantoro, 2020). Madrasah juga berperan dalam menanamkan mental beragama yang bertujuan untuk menghalau pemahaman komunis dan radikal. Bahkan salah satu tokoh penggagas madrasah di Tulungagung yaitu K. H. Muhammad Siradj juga ikut turun langsung menumpas PKI di Tulungagung dan Blitar Selatan (Basith 2014). Wujud untuk menanamkan pemahaman beragama yang baik turut dilakukan madrasah-madrasah di Tulungagung dengan melakukan kegiatan keagamaan yang juga melibatkan masyarakat yaitu seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan sebagainya. Melalui kegiatan tersebut ilmu agama selalu diberikan dengan menghadirkan ulama-ulama untuk mengisi ceramah (Suwandi, 2020).

PENUTUP

Hadirnya madrasah di Kabupaten Tulungagung secara umum dipengaruhi oleh gagasan para tokoh masyarakat, ulama, para sarjana dan upaya pengembangan dari pondok pesantren. Sekitar tahun 1957 madrasah mulai hadir dan terus tumbuh di Kabupaten Tulungagung. Memasuki tahun 1968-1984 selain menanggapi respon masyarakat, madrasah-madrasah di Kabupaten Tulungagung juga dihadapkan dengan situasi nasional yaitu situasi pasca pemberontakan PKI dan pemerintahan orde baru. Kondisi yang demikian berpengaruh pada naik dan turunnya eksistensi madrasah. Pasca pemberontakan PKI pemerintah menekankan pendidikan agama sebagai salah satu tameng untuk menghalau pemahaman dan aksi radikalisme yang ingin memecah belah bangsa. Oleh karena itu, selain melalui sekolah umum, pemerintah

berharap madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dapat mewujudkan pemahaman beragama yang menciptakan kedamaian untuk negara. Harapan tersebut oleh pemerintah kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan dan bantuan terhadap peningkatan madrasah.

Peran pemerintah kepada madrasah-madrasah di Kabupaten Tulungagung cukup baik. Pengakuan, penerangan, dan pemberian bantuan kepada madrasah dapat terlaksana meskipun terkadang juga mengalami keterlambatan. Sedangkan respon madrasah-madrasah di Kabupaten Tulungagung sendiri juga tidak buruk dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika menangani kondisi kurangnya tenaga guru, madrasah mampu mengendalikannya meskipun membutuhkan waktu untuk menyesuainya. Beberapa kendala lain

juga dapat diatasi dengan baik seperti dalam meluruskan pemahaman terhadap anggapan masyarakat tentang kualitas madrasah yang dipandang sebelah mata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat, ulama, sarjana, peristiwa penting atau bersejarah, peran pemerintah, serta respon

masyarakat merupakan elemen-elemen yang kerap mempengaruhi perkembangan madrasah-madrasah di Tulungagung dan dalam merespon berbagai situasi madrasah-madrasah di Tulungagung dapat menanganinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. 2013. "Madrasahs in Indonesia From the Colonial Period to the New Order." *Paramita* 23 (2).
- Abdurahman, Dudung. 1998. *Introduction to Research Methods and Writing Scientific Papers*. Yogyakarta: IKFA Press.
- Afcarina, Ghoziyah Ilza Rona. 2020. "History of Gandrung Blambangan in Perspective of Banyuwangi Culture" 4 (2).
- Ali, Mukti. 1947. *Modern Islamic Minds in Indonesia*. Jakarta: Tinta Mas.
- Aprilina, Romantia Nurachsan. 2019. "Teacher Strategies in Preventing the Negative Impact of Using Social Media on Students at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tulungagung Kalidawir Tulungagung." IAIN Tulungagung.
- Basith, Abdul. 2014. "K.H. Muhammad Siradj and His Struggle in Tulungagung (1906-1982)." UIN Sunan Kalijaga.
- BPS Kabupaten Tulungagung. 2020. *Tulungagung Regency in Figures 2020*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Daulay, Hidar Putra. 2007. *History of Growth and Renewal of Education in Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Esti, Nunik, and Muhammad Sadikin. 2019. "History of the Pontianak Mujahidin Education Foundation." *Santhet* 3 (1).
- Hariyono, Hariyono. 2017. "Islamic Education Policy in the New Order Period." *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 11 (2).
- Hasani Adib. 2007. "The Loss of Ider-Ider Slametan Practice in Tunggangri Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency in the Perspective of Michel Foucault's Historical Discontinuity." IAIN Tulungagung.
- Hasbullah. 1995. *History of Indonesian Muslim Education: History Traffic Growth and Development*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasbullah, Moeflich. 2012. *Intellectual Social History of Islam in Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Karim, Abdul. 2007. *History of Islamic Thought and Civilization*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Kosim, Mohammad. 2007. "Madrasah in Indonesia (Growth and Development)." *Tadris* 2 (1).
- Kuntowijoyo. 1995. *Introduction to Historical Science*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mustofa. 2019. "Management of Students in Improving the Quality of Graduates at MTs Negeri 2 Tulungagung." IAIN Tulungagung.
- Nurjannah, Rianie. 2015. "Approaches and Methods of Islamic Education (A Comparison of Islamic and Western Educational Theory Concepts)." *Jurnal: Management of Education* 1 (2).
- Permata, Harsa. 2016. "Movement of 30 September 1965 in the Perspective of Philosophy of History of Marxism." *Jurnal Filsafat* 25 (2): 220. <https://doi.org/10.22146/jf.12680>.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Qualitative Research." *Equilibrium* 5 (9).
- Rohani. 2021. "Personal Interview January 18th."
- Suryana. 2018. "Growth and Development of Madrasah in Indonesia." *Almufida* III (01).

- Suwandi. 2020. "Personal Interview December 16th."
- Thoha, As'ad. 2011. *History of Islamic Education*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Tulungagung, IAIN. 2017. *Guidelines for Implementing the 2017-2018 FUAD IAIN Tulungagung Education*. Tulungagung: IAIN tulungagung.
- Wiantoro, Indra. 2020. "The Tradition of Recitation Surah Yasin at the Pondok Pesantren Panggung Putra Karangwaru Tamanan Tulungagung." IAIN Tulungagung.
- Widyawati, Maya. 2018. "Development of Perdikan Tawang Sari Village, Tulungagung Regency 1824-1905." *Avatara* 6 (2).
- Yuningsih, Heni. 2015. "Islamic Education Policy in the New Order Period." *Jurnal Tarbiya* Volume I (Nomor 1).